

**SUMBER PENDANAAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN BERBASIS
MASTERPLAN KALURAHAN (STUDI DI KALURAHAN PUCUNG,
KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan.



Disusun oleh :

APRILAISHA TABINA SALSABILA

NIT. 22314268

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

Development implementation in Pucung Village requires proper planning so that funding sources and budget allocation can be managed effectively. However, the implementation of the *Masterplan* still faces several challenges, including a high dependence on government transfer funds and the low contribution of Village Own-Source Revenue (PADKAl). This study aims to analyze the implementation of the *Masterplan* in managing development funding sources and budget allocation in Pucung Village, Girisubo District, Gunungkidul Regency. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the *Masterplan* has become the main guideline for development implementation in Pucung Village. Development funding is still dominated by the Special Allocation Fund (*Dana Keistimewaan*), Village Fund, and Village Fund Allocation, while Village Own-Source Revenue (PADKAl) contributes only a small proportion. Budget allocation is prioritized for the development of the Wotawati tourism area and its supporting infrastructure in accordance with the *Masterplan*. In addition, the village government has managed the budget properly and transparently. The development of the Wotawati tourism area is expected to increase PADKAl, support sustainable development, and reduce dependence on government transfer funds.

Keywords: *Masterplan*, funding sources, budget allocation, village development, Village Own-Source Revenue (PADKAl).

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Literatur.....	8
B. Kerangka Teoritis.....	13
1. Paradigma Fakta Sosial.....	13
2. Teori Struktural Fungsional (Talcott Parsons-1937).....	15
3. Teori Akuntabilitas (Mark Bovens-2007)	17
4. Teori Penganggaran (Verne B. Lewis-1952).....	19
5. Sumber Pendanaan Kalurahan	21
6. Kapasitas Fiskal Kalurahan.....	23
7. Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Kalurahan	26
8. Perencanaan Pembangunan.....	28
9. Implementasi Kebijakan (George C. Edward III).....	29
10. Collaborative Governance	31
11. <i>Masterplan</i> Kalurahan	33
C. Kerangka Pemikiran	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Format Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Operasionalisasi Penelitian.....	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	52
A. Kondisi Geografis.....	52
B. Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi.....	55
C. Potensi Wilayah	59
BAB V PENDANAAN DAN PENGGUNAANNYA	64
A. Sumber Pendanaan dan Penggunaan Anggaran.....	64
1. Klasifikasi dan Proporsi Sumber Pendanaan Utama Pemerintahan Kalurahan.....	64
2. Proporsi BKK Wotawati terhadap APBKal dan Implikasinya terhadap Kapasitas Fiskal Kalurahan.....	80
3. Kontribusi Pihak Ketiga dan Pola Kolaborasi Pendanaan	86
B. Kendala Pengelolaan Sumber Pendanaan dan Penggunaan Anggaran.....	88
1. Keterbatasan Ruang Fiskal akibat Kebijakan Pemerintah Pusat	88
2. Kesenjangan Antara Usulan Pembangunan dan Realisasi Anggaran	90
3. Hambatan dalam Pemeliharaan dan Keberlanjutan Hasil Pembangunan	93
4. Tantangan Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan	96
C. Solusi Pengelolaan Sumber Pendanaan dan Penggunaan Anggaran	99
1. Pengembangan Kawasan Wisata sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Fiskal.....	99
2. Musyawarah Skala Prioritas dan Pelaksanaan Pembangunan Secara Bertahap	103
3. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran.....	104
BAB VI PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan wilayah pada hakikatnya merupakan proses transformasi sosial, ekonomi, dan spasial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui perencanaan pembangunan yang terarah dan adaptif. Perencanaan pembangunan dipahami sebagai instrumen vital dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama di negara berkembang, karena mencakup strategi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial serta mengatasi ketimpangan dan degradasi lingkungan. Dalam konteks tersebut, pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai penguatan kapasitas kelembagaan, tata kelola, serta integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara simultan. Oleh karena itu, pendekatan perencanaan yang holistik dan adaptif menjadi prasyarat agar pembangunan tidak berjalan sporadis, melainkan terarah dan berkelanjutan sesuai kondisi lokal (Niamey dkk., 2024:399).

Dalam kerangka tersebut, pembangunan kalurahan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dengan potensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang dapat dikembangkan secara mandiri. Identifikasi dan pengembangan potensi desa menjadi langkah strategis dalam mendorong pembangunan pedesaan berkelanjutan yang berbasis pada sumber daya lokal (Pujiyanto, 2024:82). Perencanaan pembangunan desa yang berbasis potensi lokal sebagaimana tertuang dalam RPJMKal merupakan strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana desa serta mendorong kegiatan ekonomi produktif dan inklusif. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan kalurahan sangat ditentukan oleh kecukupan sumber pendanaan serta kejelasan arah perencanaan yang terintegrasi dalam dokumen pembangunan desa agar berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan (Pujiyanto, 2024:83).

Sumber pendanaan kalurahan merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat

kalurahan. Struktur pendapatan tersebut pada umumnya bersumber dari pendapatan asli kalurahan (PAK_{al}), Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan provinsi maupun kabupaten, serta hibah atau pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Kalurahan Pucung, 2022:33). Pembangunan akan berjalan efektif apabila pendanaan tersedia secara memadai dan digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat (Nugroho, 2023b:1185). Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi prasyarat penting untuk memastikan penggunaan dana berlangsung transparan dan akuntabel (Bili dkk., 2024:10). Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal menjadi kunci dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan serta mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan (Azizi dkk., 2023:38).

Aspek strategis berikutnya adalah pengelolaan anggaran. Anggaran kalurahan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga merupakan bagian dari sistem tata kelola pembangunan desa yang menentukan arah kebijakan dan prioritas program pemerintah kalurahan (Vambia dkk., 2025:59-60). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa anggaran harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan partisipatif. Efektivitas penggunaan anggaran terbukti berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama apabila dialokasikan pada kegiatan produktif yang sesuai dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Penguatan penggunaan anggaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kohesi sosial apabila diarahkan pada sektor ekonomi rakyat dan agraria (Nugroho, 2024a:53).

Seiring dengan perkembangan paradigma pembangunan, kalurahan memerlukan dokumen perencanaan jangka panjang yang komprehensif, yaitu *masterplan*. *Masterplan* berfungsi untuk mengarahkan pembangunan secara sistematis dengan mencerminkan potensi wilayah, kebutuhan masyarakat, serta pengelolaan ruang jangka panjang (Ratnawati & Sulistyani, 2019:258). Selain itu, *masterplan* menyusun strategi pembangunan sosial-ekonomi yang

terintegrasi guna mencegah konflik dan tumpang tindih dalam penggunaan ruang (Tarlani dkk., 2022:1540). Dengan demikian, *masterplan* idealnya menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan tahunan agar pembangunan kalurahan selaras dengan visi jangka panjang.

Kalurahan Pucung telah memiliki dokumen *Masterplan* Kalurahan Pucung Tahun 2022–2042 yang disusun secara partisipatif dengan fasilitasi Tim Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) (Pemerintah Kalurahan Pucung, 2022:3-4). Penyusunan *masterplan* diinisiasi melalui pertemuan antara Pemerintah Kalurahan Pucung dan Tim STPN pada tahun 2021 dan kemudian ditetapkan sebagai pedoman pembangunan jangka panjang yang berlaku sejak tahun 2022 hingga tahun 2042 (Pemerintah Kalurahan Pucung, 2022:3). *Masterplan* ini berfungsi sebagai rencana induk pembangunan wilayah selama dua puluh tahun yang menjadi dasar arah kebijakan pembangunan kalurahan (Pemerintah Kalurahan Pucung, 2022:4).

Secara geografis, Kalurahan Pucung merupakan wilayah kawasan karst dengan karakteristik topografi berbukit dan dominasi batuan kapur yang menyebabkan keterbatasan lahan produktif serta ketersediaan sumber air. Kondisi tersebut berdampak pada pola pemanfaatan tanah, produktivitas pertanian, serta kebutuhan infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih dan fasilitas umum. Meskipun demikian, Pucung memiliki potensi pertanian lahan kering, peternakan, serta pengembangan pariwisata berbasis bentang alam dan kawasan geopark (Nugroho, 2024b:100-101). Potensi tersebut memerlukan arah pembangunan yang terstruktur agar pemanfaatan ruang dan aset pertanahan dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Masterplan Kalurahan Pucung menetapkan zonasi pembangunan pertanian, konservasi lahan, fasilitas umum, serta kawasan pariwisata berbasis wilayah (Pemerintah Kalurahan Pucung, 2022:15-18). Dokumen ini juga mengatur pemanfaatan tanah kas desa, penataan batas wilayah, inventarisasi aset, serta perencanaan kawasan pertanian dan non-pertanian (Pemerintah Kalurahan Pucung, 2022:22-25). Dengan demikian, *masterplan* memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan pertanahan sekaligus terhadap kebijakan

fiskal kalurahan karena implementasinya memerlukan dukungan pendanaan melalui APBKal.

Dalam kerangka penelitian ini, terdapat hubungan sistematis antara struktur pendanaan, penggunaan anggaran melalui APBKal, dan arah pembangunan yang ditetapkan dalam *masterplan*. Sumber pendanaan menentukan kapasitas fiskal kalurahan, kapasitas fiskal memengaruhi alokasi dan penggunaan anggaran, sedangkan penggunaan anggaran idealnya selaras dengan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan dalam *masterplan*. Namun demikian, implementasi *masterplan* belum sepenuhnya tercermin dalam dokumen perencanaan tahunan dan realisasi APBKal, sehingga terjadi kesenjangan antara perencanaan strategis dan kebijakan fiskal tahunan. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara arah perencanaan dan struktur pembiayaan (Nugroho, 2023a:343).

Fenomena ini juga berkaitan dengan dimensi tata kelola pembangunan. Dalam perspektif collaborative governance, kebijakan publik yang kompleks memerlukan komunikasi deliberatif, partisipasi yang setara, dan pencapaian konsensus antar pemangku kepentingan (Pakaya dkk., 2025:82-83). Proses kolaboratif memerlukan identifikasi persoalan serta dialog antar aktor sebelum perumusan tindakan bersama (Pakaya dkk., 2025:81-82). Komunikasi yang tidak berjalan terbuka dan partisipasi yang tidak setara berpotensi menghasilkan keputusan yang didominasi oleh aktor tertentu (Pakaya dkk., 2025:84-85). Transparansi komunikasi dan distribusi kewenangan yang seimbang menjadi prasyarat untuk membangun kepercayaan serta komitmen kolektif dalam implementasi kebijakan (Husna dkk., 2025:72-73).

Dengan demikian, persoalan sinkronisasi antara *masterplan* dan APBKal di Kalurahan Pucung bukan hanya persoalan teknis anggaran, tetapi juga menyangkut kualitas tata kelola kolaboratif dalam pengambilan keputusan. Apabila penggunaan anggaran tidak selaras dengan arahan pemanfaatan ruang dan pengelolaan aset pertanahan yang telah ditetapkan dalam *masterplan*, maka pembangunan berbasis agraria sebagai fondasi wilayah berisiko tidak optimal.

Meskipun telah terdapat berbagai penelitian mengenai pengelolaan dana desa dan pembangunan berbasis potensi wilayah, kajian yang secara khusus menganalisis sinkronisasi antara sumber pendanaan, penggunaan anggaran, dan implementasi *masterplan* dalam perspektif pertanahan dan *collaborative governance* masih terbatas.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, penelitian mengenai pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis *masterplan* di Kalurahan Pucung menjadi penting untuk memperkuat kajian pembangunan kalurahan dan pertanahan. Penelitian ini berfokus pada sinkronisasi antara struktur pendanaan, dan kebijakan penganggaran, sehingga diharapkan APBKal mampu mendukung implementasi *masterplan* secara optimal. Keselarasan tersebut merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berkeadilan agraria (A. M. Putri dkk., 2025:170-171). Selain itu, penguatan tata kelola keuangan melalui digitalisasi penganggaran menjadi aspek penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penggunaan anggaran dapat berlangsung lebih efektif (A. M. Putri dkk., 2025:178-179). Dengan mengintegrasikan analisis mengenai pendanaan, penganggaran, tata ruang, dan tata kelola kolaboratif, setiap rekomendasi yang dihasilkan diharapkan berkontribusi pada pencapaian visi Pucung Mandara, yaitu kalurahan yang mandiri, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian berjudul Sumber Pendanaan dan Penggunaan Anggaran Berbasis *Masterplan* Kalurahan (Studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon GiriSubo, Kabupaten Gunung Kidul).

B. Rumusan Masalah

Setiap penelitian perlu memiliki arah kajian yang jelas agar pembahasan tidak melebar dan tetap fokus pada inti kajian ilmiah. Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat fenomena kesenjangan antara arah pembangunan jangka panjang yang ditetapkan dalam *Masterplan* Kalurahan dengan realisasi pendanaan dan penggunaan anggaran melalui APBKal di Kalurahan Pucung. Kesenjangan ini berpotensi memengaruhi efektivitas pembangunan desa,

terutama dalam pemanfaatan ruang dan aset agraria sebagai basis pembangunan wilayah. Oleh karena itu, guna memberikan batas kajian yang terarah, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis *masterplan* Kalurahan, di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam mengelola sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis *masterplan* Kalurahan Pucung?
3. Apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengelola sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis *masterplan* Kalurahan Pucung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas dalam proses penelitian serta memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat menjawab permasalahan secara menyeluruh. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis *masterplan* Kalurahan, di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengelola sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis *masterplan* Kalurahan Pucung.
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengelola sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis *masterplan* Kalurahan Pucung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis bagi berbagai pihak yang terkait. Adapun kegunaan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanahan, perencanaan pembangunan, dan administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, dan implementasi *masterplan* kalurahan. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai integrasi antara perencanaan spasial dan penganggaran publik pada tingkat pemerintahan lokal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori penganggaran berbasis kinerja dan sinkronisasi perencanaan–penganggaran dalam konteks pembangunan berbasis wilayah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam pengelolaan sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis *masterplan* di tingkat kalurahan. Temuan penelitian dapat membantu mengidentifikasi kendala dalam sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dan realisasi anggaran tahunan, serta memberikan alternatif solusi yang aplikatif untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperbaiki praktik tata kelola keuangan dan perencanaan pembangunan di lapangan agar lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

3. Kegunaan Sosial

Secara sosial, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penggunaan anggaran pembangunan kalurahan. Sinkronisasi antara *masterplan* dan APBD yang lebih baik dapat mendorong pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan transparansi, serta memperkuat partisipasi warga dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mendukung terwujudnya pembangunan kalurahan yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Masterplan Kalurahan Pucung masih memiliki ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal, khususnya Dana Keistimewaan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Berdasarkan analisis APBKal Tahun Anggaran 2024–2026, alokasi Dana Keistimewaan untuk pengembangan Kawasan Wisata Wotawati memiliki proporsi yang besar terhadap total pendapatan APBKal. Pada tahun 2024, alokasi Dana Keistimewaan mencapai 67,59% dari total pendapatan APBKal, kemudian sebesar 60,08% pada tahun 2025, dan 56,37% pada tahun 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kawasan Wotawati menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Kalurahan Pucung. Namun, besarnya proporsi anggaran tersebut belum dapat disimpulkan sebagai bentuk ketimpangan pembangunan karena Dana Keistimewaan diberikan berdasarkan program dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan anggaran dalam pengembangan Kawasan Wisata Wotawati telah menghasilkan pembangunan fisik dan peningkatan aktivitas kawasan, tetapi masih menghadapi tantangan dalam aspek keberlanjutan ekonomi dan pemerataan manfaat pembangunan. Hasil observasi dan triangulasi data menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas kawasan seperti penataan lingkungan, fasilitas pendukung wisata, dan infrastruktur kawasan dapat dikonfirmasi telah dilaksanakan. Namun, konsentrasi anggaran pada satu kawasan memiliki risiko terhadap pemerataan pembangunan apabila manfaat ekonomi dan pembangunan belum mampu dirasakan oleh masyarakat di seluruh padukuhan.
3. Persepsi masyarakat terhadap pembangunan Kalurahan Pucung secara umum menunjukkan respons positif, tetapi tidak sepenuhnya menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan anggaran. Masyarakat lebih banyak menilai keberhasilan pembangunan berdasarkan

manfaat fisik yang dapat diamati secara langsung. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam memahami struktur APBD, sumber pendanaan, serta distribusi anggaran. Selain itu, keterlibatan masyarakat muda dalam proses pembangunan masih terbatas karena sebagian pemuda bekerja atau berada di luar wilayah.

4. Pengembangan Kawasan Wisata Wotawati mulai menunjukkan dampak ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisata dan aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan data pengelola kawasan, jumlah kunjungan wisata pada tahun 2025 mencapai 3.856 pengunjung dengan jumlah wisatawan menginap sebanyak 387 orang. Sementara itu, sampai dengan Mei 2026 jumlah kunjungan mencapai 4.323 pengunjung dengan jumlah wisatawan menginap sebanyak 211 orang. Aktivitas wisata tersebut menghasilkan penerimaan ekonomi kawasan sebesar Rp128.060.000 pada tahun 2025 dan Rp92.100.000 sampai Mei 2026 yang berasal dari aktivitas parkir, paket wisata, homestay, warung, persewaan pakaian adat, dan UMKM.
5. Pengembangan Kawasan Wisata Wotawati memiliki potensi sebagai strategi peningkatan kemandirian fiskal Kalurahan Pucung, tetapi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Kalurahan (PADK) belum sepenuhnya dapat diukur. Hal tersebut disebabkan karena data yang tersedia masih menunjukkan penerimaan ekonomi kawasan dan belum seluruhnya menggambarkan pendapatan bersih yang masuk ke pemerintah kalurahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola wisata melalui pencatatan jumlah pengunjung, penerimaan, biaya operasional, pemeliharaan aset, serta mekanisme kontribusi pendapatan kawasan terhadap PADK. Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama pada variasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dan keterbatasan keterlibatan masyarakat muda sebagai informan. Selain itu, meskipun data perkembangan kunjungan wisata dan aktivitas ekonomi Kawasan Wotawati telah tersedia, pengukuran kontribusi langsung terhadap PADK masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu

dipahami sesuai konteks Kalurahan Pucung dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh pandangan masyarakat secara umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyadari bahwa pengelolaan sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis *Masterplan* masih memerlukan berbagai upaya penyempurnaan agar pembangunan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah kalurahan, pemerintah daerah, masyarakat, maupun peneliti selanjutnya sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kalurahan Pucung

Pemerintah Kalurahan Pucung perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan sumber pendanaan pembangunan, khususnya dalam penggunaan Dana Keistimewaan yang memiliki proporsi besar terhadap total pendapatan APBKal. Pada tahun 2024, alokasi Dana Keistimewaan untuk Kawasan Wotawati mencapai 67,59% dari total pendapatan APBKal, kemudian menurun menjadi 60,08% pada tahun 2025 dan 56,37% pada tahun 2026. Besarnya proporsi tersebut perlu diimbangi dengan strategi pemerataan pembangunan agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada satu kawasan, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh padukuhan di Kalurahan Pucung.

Selain itu, pemerintah kalurahan perlu memperkuat sistem transparansi anggaran melalui penyampaian informasi APBKal yang lebih mudah dipahami masyarakat. Publikasi anggaran tidak hanya sebatas penyediaan informasi, tetapi perlu disertai dengan penjelasan mengenai sumber dana, tujuan penggunaan anggaran, serta manfaat pembangunan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses pengawasan..

2. Bagi Pengelola Kawasan Wisata Wotawati

Pengelola Kawasan Wisata Wotawati perlu meningkatkan tata kelola wisata agar pembangunan kawasan dapat memberikan kontribusi ekonomi

yang lebih berkelanjutan. Berdasarkan data penelitian, jumlah kunjungan wisata pada tahun 2025 mencapai 3.856 pengunjung dan meningkat menjadi 4.323 pengunjung sampai Mei 2026, dengan penerimaan ekonomi kawasan sebesar Rp128.060.000 pada tahun 2025 dan Rp92.100.000 sampai Mei 2026.

Namun, penerimaan tersebut masih berupa penerimaan ekonomi kawasan dan belum sepenuhnya menunjukkan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Kalurahan (PADKal). Oleh karena itu, diperlukan sistem pencatatan yang lebih terstruktur mengenai jumlah pengunjung, jenis penerimaan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, serta mekanisme kontribusi pendapatan kepada pemerintah kalurahan.

3. Bagi Masyarakat Kalurahan Pucung

Pemerintah kalurahan perlu memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kawasan Wisata Wotawati agar manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan UMKM, penyediaan produk lokal, keterlibatan masyarakat dalam layanan wisata, serta pembukaan peluang usaha bagi masyarakat dari berbagai padukuhan.

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, terutama kelompok masyarakat muda yang saat ini masih terbatas keterlibatannya karena sebagian bekerja atau berada di luar wilayah. Peningkatan partisipasi tersebut penting agar pembangunan tidak hanya diterima sebagai hasil akhir, tetapi juga dipahami dan diawasi oleh masyarakat.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak ekonomi Kawasan Wisata Wotawati terhadap kemandirian fiskal Kalurahan Pucung dengan menggunakan data yang lebih lengkap, seperti perbandingan antara investasi pembangunan kawasan, jumlah pendapatan yang dihasilkan, biaya operasional, serta kontribusi nyata terhadap PADKal.

Selain itu, penelitian berikutnya dapat memperluas kajian mengenai pemerataan manfaat pembangunan antar-padukuhan dengan menggunakan data distribusi belanja pembangunan berdasarkan wilayah sehingga dapat diketahui secara lebih jelas hubungan antara prioritas pembangunan kawasan wisata dengan pemerataan pembangunan kalurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, B. O., & Fikri, M. A. (2021). Status Hak Atas Tanah Kas Desa dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan. *Pandecta*, 16(2), 205–217.
- Aisyah, S. (2024). *Pengelolaan Tanah Kas Desa untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Purwodadi Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul*.
- Amarullah, A. K. (2023). Kajian Literatur dalam Menyusun Referensi Kunci, State of the Art, dan Keterbaharuan Penelitian (Novelty). *Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 37–52.
- Anggriawan, T., Susilo, & Prasetyia, F. (2025). *Does Indonesian Fiscal Decentralization Lead to Local-Central Fiscal Dependency?* 11(1), 117–125.
- Arif, & Bahri, E. S. (2025). Effectiveness of Village Revenue and Expenditure Budget Management (APBDes) in Indonesia : Literature Review. *Journal of Multi-Disciplines Science*, 3(1), 1–8.
- Azizi, A. H., Sukimin, S., & Nuswanto, A. H. (2023). Optimalisasi Pengalokasian Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. *Semarang Law Review (SLR)*, 4(1), 23–37. <https://doi.org/10.26623/slr.v4i1.6521>
- Bili, M., Yohanes, S., & Lamataro, C. W. . (2024). Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(04), 1–12. <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i04.4379>
- Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework 1*. 13(4), 447–468.
- Durkheim, E. (1982). *The Rules of Sociological Method*.
- Firmansyah, Salahuddin, & Kadir, A. (2024). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi: di Desa Rasabou Kecamatan Sape, Kabupaten Bima). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6), 822–831.
- Fitriani, I., Solihan, S., & Bahari, Y. (2025). *Fenomena Cyberbullying di Kalangan Remaja : Analisis Adaptasi Sosial dengan Pendekatan Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons*. 4(1), 6627–6634.
- Ginting, G., Kuswandi, A., & Budiati, A. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kandui : Faktor Pengaruh dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 112–129.
- Hermawan, A. (2024). Penyusunan Masterplan Pembangunan Desa Wisata

- Peningkiran Majalengka. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 53–62.
- Huda, N., Hernandi, A., Gumilar, I., Meilano, I., & Cahyaningtyas, L. A. (2024). The Strategic Development of Quality Improvement Land Data Incrementally Using Integrated PESTEL and SWOT Analysis in Indonesia. *Land*, 13(10), 1–21. <https://doi.org/10.3390/land13101655>
- Husna, N. U., Putera, R. E., & Aromatica, D. (2025). Collaborative Governance dalam Tata Kelola Desa Wisata Kampuang Sarugo di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, 9, 63–76.
- Istifazhuddin, A. H., & Mardianta, A. (2025). Evaluation of the implementation of the village fund allocation policy. *Journal of Economic Resilience and Sustainable Development*, 2(1), 1–14.
- Kayupa, O. O., Guampe, F. A., Hengkeng, J., & Balo, M. J. (2025). Tantangan dan Peluang Implementasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa-Desa di Indonesia (Challenges and Opportunities for Implementing Participatory Village Development Planning in Indonesia). *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 6(1), 187–199.
- Kemenkeu. (2019). *Buku Pintar Dana Desa*.
- Lasriati, DM, R., & Abdullah. (2025). Analisis Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus: Kantor Desa Bulogading, Kec. Bontonombo, Kab. Gowa). *Ezenza Journal*, 4, 38–53.
- Lewis, V. B. (2017). Toward a theory of budgeting. *Performance Based Budgeting*, 12(1), 42–54. <https://doi.org/10.4324/9780429498411>
- Niamy, F. M., Islam, U., Abdurrahman, N. K. H., & Pekalongan, W. (2024). Analisis Teori dan Konsep Perencanaan Pembangunan : Studi Kasus pada Negara Berkembang. 3(2), 398–406.
- Nugroho, A. (2023a). Community Business Action Plan Based on Regional Potential in the Framework of Agrarian Reform. *Injuruty: Interdisciplinary Journal and Humanity*, 2(4), 332–344.
- Nugroho, A. (2023b). Development of Pucung Village Masterplan Giri Subo District, Gunung Kidul Regency. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(4), 1185–1197. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v3i4.945>
- Nugroho, A. (2024a). Canvas Model Business Training for Pucung Village Tourist Activist. *International Journal of Educational Review, Law ...*, 1, 53–67. <http://radjapublika.com/index.php/IJERLAS/article/view/1383>
- Nugroho, A. (2024b). Impact of Strengthening Business Ethos on Agrarian Resource-Based Micro Enterprises. *Jurnal Impresi Indonesia*, 3(2), 100–112.

<https://doi.org/10.58344/jii.v3i2.4637>

- Nugroho, A. (2025). Riset Agraria dengan Metode Penelitian Kualitatif. *Tangguh Denara Jaya Publisher*: 43-53.
- Pakaya, A. I. N. R., Kurniawan, I. A., & Prasetyo, E. (2025). Model Collaborative Governance pada Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program Gebrak Pakumis Plus di Desa Muara Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, 9, 77–92.
- Pangestu, A., & Anshori, I. (2024). *Tipologi Madrasah Ibtidaiyah Berbasis Pesantren Perspektif Perubahan Sosial Talcott Parsons*. 15–24.
- Pemerintah Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo. (2022). *Masterplan Kalurahan Pucung*. 1–82.
- Permadi, F. B., Utami, W., & Nur Rokhman, T. (2021). Collaboration of Three Stakeholders “Trisula” in Realizing the Complete Village Map Kolaborasi Tiga Pemangku Kepentingan “Trisula” Dalam Mewujudkan Peta Desa Yang Lengkap. *Jurnal Sosioteknologi*, 20(2), 210–224.
- Pujiyanto, T. (2024). *Identifikasi Dan Perencanaan Pengembangan Potensi Desa Untuk Mendukung Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan : Studi Kasus Desa Sumberejo*. 12(2), 81–88.
- Purwanti, A., Fresiliasari, O., Alfaruq, Z. A. M., Sudjono, & Sukomardojo, T. (2024). *PARTICIPATORY BUDGETING IN EMERGING ECONOMIES: ENHANCING TRANSPARENCY AND*. 10(2), 265–281. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v10i2.58084>
- Putri, A. M., Luthfiah, A., Larasati, N. D., & Melati, S. A. G. (2025). Analisis Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) di Kalurahan Sumberagung Kabupaten Bantul DIY. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 3(3), 170–181. <https://doi.org/10.61896/jeki.v3i3.123>
- Putri, S. A., Samsinar, & Syachbrani, W. (2025). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Balang Butung Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar*. 5942, 1289–1300.
- Ramadhani, L. F., Maromi, N., & Tudin, A. K. (2024). *Pendekatan Sibernetika Dalam Hukum : Analisis Presepsi Talcott Parsons Terhadap Dinamika Sistem Nasional Hukum Indonesia*. 2(4), 234–240.
- Ramdani, R. S., Nurhannis, & Abdi, F. S. (2025). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kreatif Lapangan di Pasar Masomba Kota Palu. *Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(2), 1–14.
- Ratnawati, R., & Sulistyani, A. T. (2019). The Quality of Documents and Preparation of Village Mid-Term Development Planning (RPJMDes) after the

- Establishment of Village Law. *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 35(2), 253–264. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i2.4126>
- Semarteboy, E. (2023). *Kewenangan Kalurahan dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Kalurahan Mandiri Budaya di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul*. 19520070.
- Sopannah, A., Sodik, M., Bahri, S., & Puspitosarie, E. (2023). *Public participation in budgeting practices in village government*. 1, 93–102. <https://doi.org/10.20885/InCAF.vol1.art11>
- Tarlani, T., Dariah, A. R., & Rani, A. M. (2022). Transforming Rural Economy Through Community-Based Tourism with Village-Owned Enterprise (BUMDES, Badan Usaha Milik Desa) - A Case Study: Cibiru Wetan, Pagerwangi and Cipamekar Villages, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(5), 1535–1542. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.170517>
- Tiwa, R. C., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2023). Implementasi Kebijakan dalam Menangani Kekacauan Antar Desa di Kecamatan Tomposo Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, IX(3), 339–350.
- Vambia, A. D., Septiana, E. A., Wijaya, M. S., Putra, P., & Gunawan, R. R. (2025). *Evaluating Regulatory Compliance in Village Budgeting : A Case Study of Village Budget Implementation*. 10(01), 59–70. <https://doi.org/10.33062/ajb.v10i01.79>
- Wahyuni, S., Nasrullah, M., Nasir, & Abdi, F. S. (2025). Management of the Village Revenue and Expenditure Budget in Corawali Village , Sidrap Regency. *Journal of Public Policy and Local Government*, 2(3), 111–119.
- Widyaningrum, D. P., Virgiawan, A., Hidayat, F., Ulumudin, N. M., & Kurnianingtyas, A. P. (2025). Penyusunan Masterplan Pengembangan Desa Ujungnegero dan Depok Kabupaten Batang dengan Konsep Sustainable Community Based Tourism. *Jurnal Pengabdian Kolaboratif*, 3(2), 34–42. <https://doi.org/10.26623/kolaboratif.v3i2.11764>